



# Kebijakan Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Terhadap Kelayakan Implementasi Berkelanjutan Yang Berdampak Secara *Multiplier Effect* Dengan Pemanfaatan Teknologi

Diding Bajuri<sup>1\*</sup>, Nurul Jannah Lailatul Fitria<sup>2</sup>, Sigit Sugiarto<sup>3</sup>, Elih Solehah Fatimah<sup>4</sup>, Elawati<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup>Mahasiswa Pascasarjana Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

\*Corresponding Author:  
[didingbajuri@unma.ac.id](mailto:didingbajuri@unma.ac.id)

## Article History:

Received 2026-03-09

Revised 2026-04-02

Accepted 2026-05-10

## Keywords:

Sustainability, policy, MBG, multiplier effect, technology

## Kata Kunci:

Berkelanjutan, kebijakan, MBG, multiplier effect, teknologi

## Abstract

*Free Nutritious Meal (MBG) program is a strategic government policy aimed at improving students' nutritional quality and supporting human resource development toward Indonesia Emas 2045. In addition to fulfilling nutritional needs, the MBG program also has the potential to create a multiplier effect on the local economy through the involvement of MSMEs, local farmers, and food distribution providers. However, the implementation of the program still faces several challenges related to governance, sustainability, inter-institutional coordination, and the utilization of technology. This study aims to analyze the governance of the MBG program toward the feasibility of sustainable implementation that generates a multiplier effect through technology utilization. This research employed a mixed methods approach with a Sequential Explanatory design. Data were collected through questionnaires, interviews, observations, and documentation. Quantitative data were analyzed using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), while qualitative data were analyzed using narrative analysis techniques. The results indicate that governance plays an important role in supporting sustainable implementation, strengthening stakeholder coordination, and enhancing local economic impacts. Furthermore, technology utilization contributes to improving transparency, monitoring, and accountability in program implementation.*

## Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain berorientasi pada pemenuhan gizi, program MBG juga memiliki potensi multiplier effect terhadap penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani lokal, dan penyedia jasa distribusi pangan. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tata kelola, keberlanjutan implementasi, koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pelaksanaan MBG terhadap kelayakan implementasi berkelanjutan yang berdampak secara *multiplier effect* dengan pemanfaatan teknologi. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *Sequential Explanatory*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kuantitatif menggunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), sedangkan data kualitatif dianalisis melalui teknik analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program MBG berpengaruh terhadap keberlanjutan implementasi program, efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan ekonomi lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan transparansi, monitoring, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

## PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menurunkan angka stunting, serta memperkuat kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi anak usia sekolah. Dalam perspektif



pembangunan manusia, pemenuhan gizi memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan kognitif, daya pikir, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi muda (UNESCO, 2022). Selain mendukung kesehatan fisik, asupan gizi yang baik juga berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademik dan kualitas pembelajaran peserta didik (Sammeng & Soumokil, 2023; Harjani, 2024). Oleh karena itu, program MBG tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pangan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sosial dan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, implementasi MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor usaha lokal. Program MBG melibatkan berbagai aktor, seperti UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani lokal, serta rantai distribusi pangan daerah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi *multiplier effect* terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara inklusif. Data *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) tahun 2024 menunjukkan bahwa anggaran MBG sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025 diproyeksikan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp4.510 triliun atau sekitar 34,2% dari estimasi PDB konstan tahun 2025 melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa MBG memiliki dampak strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi nasional secara lebih luas. Meskipun demikian, implementasi program MBG masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program sosial berskala nasional sering menghadapi permasalahan tata kelola, koordinasi antar lembaga, efektivitas distribusi, pengawasan program, serta keberlanjutan implementasi kebijakan (Agustini et al, 2025; Orbawati et al., 2025). Dalam konteks MBG, tantangan tersebut meliputi keberlanjutan anggaran, kesiapan regulasi, pemenuhan standar keamanan pangan, ketidaksiapan infrastruktur distribusi, serta potensi inefisiensi tata kelola program. Di sisi lain, munculnya pro dan kontra di masyarakat terkait efektivitas dan keberlanjutan MBG menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih memerlukan penguatan tata kelola yang lebih terintegrasi dan adaptif (Kiftiyah et al., 2025; Rahayu, 2025).

Permasalahan implementasi MBG menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan pembangunan ekonomi lokal belum sepenuhnya didukung oleh sistem tata kelola yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau cakupan penerima manfaat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas *governance*, kolaborasi antar pemangku kepentingan, efektivitas pengawasan, serta kemampuan adaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial dan ekonomi (Creswell & Creswell, 2022). Oleh karena itu, tata kelola program MBG menjadi aspek penting yang perlu dikaji untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain tata kelola, perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi program publik. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola kebijakan memungkinkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi distribusi, serta pengawasan program secara *real-time*. Dalam implementasi MBG, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung validasi data penerima manfaat, monitoring distribusi pangan, pengawasan kualitas makanan, hingga pengelolaan data program secara terintegrasi. Penelitian mengenai *digital governance* menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam administrasi publik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah (Pratama & Setiawan, 2024). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan implementasi program MBG.

Penelitian mengenai MBG sebelumnya umumnya masih berfokus pada aspek gizi, pendidikan, efektivitas program, maupun implementasi kebijakan secara parsial (Basuki et al., 2026; Huda et al., 2026). Beberapa penelitian juga membahas dampak ekonomi program MBG terhadap masyarakat lokal, namun belum mengintegrasikan aspek tata kelola, keberlanjutan implementasi, *multiplier effect*, dan pemanfaatan teknologi dalam satu kerangka analisis yang komprehensif (Santoso et al., 2025). Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menempatkan MBG sebagai kebijakan sektoral sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antara tata kelola kebijakan, dampak ekonomi, dan inovasi teknologi secara holistik. Dengan demikian, masih terdapat *research gap* terkait bagaimana tata kelola pelaksanaan MBG memengaruhi kelayakan implementasi berkelanjutan dan menghasilkan *multiplier effect* melalui dukungan teknologi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian administrasi publik, khususnya mengenai *governance*, *sustainable policy implementation*, dan *digital governance* dalam program sosial pemerintah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola program MBG agar lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi aspek tata kelola, kelayakan implementasi berkelanjutan, *multiplier effect*, dan pemanfaatan teknologi dalam satu model analisis terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pelaksanaan MBG dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak secara *multiplier effect* melalui pemanfaatan teknologi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *Sequential Explanatory*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai tata kelola program MBG memerlukan analisis kuantitatif untuk mengukur hubungan antar variabel, sekaligus analisis kualitatif untuk memahami proses implementasi kebijakan, tantangan tata kelola, keberlanjutan program, *multiplier effect*, dan pemanfaatan teknologi secara lebih mendalam. *Mixed methods* memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif melalui penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian (Sugiyono, 2020; Creswell & Creswell, 2022). Desain *Sequential Explanatory* dilakukan melalui dua tahap penelitian. Tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh tata kelola pelaksanaan MBG terhadap kelayakan implementasi berkelanjutan yang berdampak secara *multiplier effect* dengan pemanfaatan teknologi. Tahap kedua menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperdalam hasil kuantitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan MBG di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majalengka dengan fokus penelitian pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah penerima program MBG, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada implementasi program MBG yang mulai berkembang di Kabupaten Majalengka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, penyedia bahan pangan, UMKM, dan masyarakat penerima manfaat. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi program MBG di Kabupaten Majalengka. Sampel penelitian kuantitatif ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan responden dalam pelaksanaan program MBG. Sementara itu, informan penelitian kualitatif dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* sampling untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait tata kelola, keberlanjutan implementasi, *multiplier effect*, dan pemanfaatan teknologi dalam program MBG. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri atas kuesioner

semi-terstruktur, pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi responden terhadap tata kelola program MBG, keberlanjutan implementasi, *multiplier effect*, dan pemanfaatan teknologi. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, koordinasi antar pemangku kepentingan, tantangan pelaksanaan program, serta strategi penguatan tata kelola MBG. Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengamati pelaksanaan program MBG, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa regulasi, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada responden yang terlibat dalam implementasi program MBG. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan program, seperti pengelola program, pihak sekolah, penyedia bahan pangan, dan pemerintah daerah. Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai mekanisme distribusi pangan, pelaksanaan program, dan pengawasan kegiatan MBG. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan program, serta data pendukung lainnya. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Analisis ini digunakan untuk menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability*, dan Cronbach's alpha, serta mengukur hubungan antar variabel penelitian. Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan menggunakan teknik analisis naratif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, *coding*, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan aplikasi ATLAS.ti. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola pelaksanaan MBG terhadap kelayakan implementasi berkelanjutan yang berdampak secara *multiplier effect* dengan pemanfaatan teknologi.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama khususnya pada tahap penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara, dan interpretasi data penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi data sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pelaksanaan MBG terhadap kelayakan implementasi berkelanjutan yang berdampak secara *multiplier effect* dengan pemanfaatan teknologi. Hasil penelitian diperoleh melalui pendekatan *mixed methods* dengan desain *Sequential Explanatory* yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Tahap kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat dalam implementasi program MBG di Kabupaten Majalengka, sedangkan tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk analisis statistik, tabel, diagram, serta interpretasi data yang diperkuat dengan hasil wawancara dan observasi lapangan.

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, latar belakang pekerjaan, dan keterlibatan dalam implementasi program MBG. Distribusi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

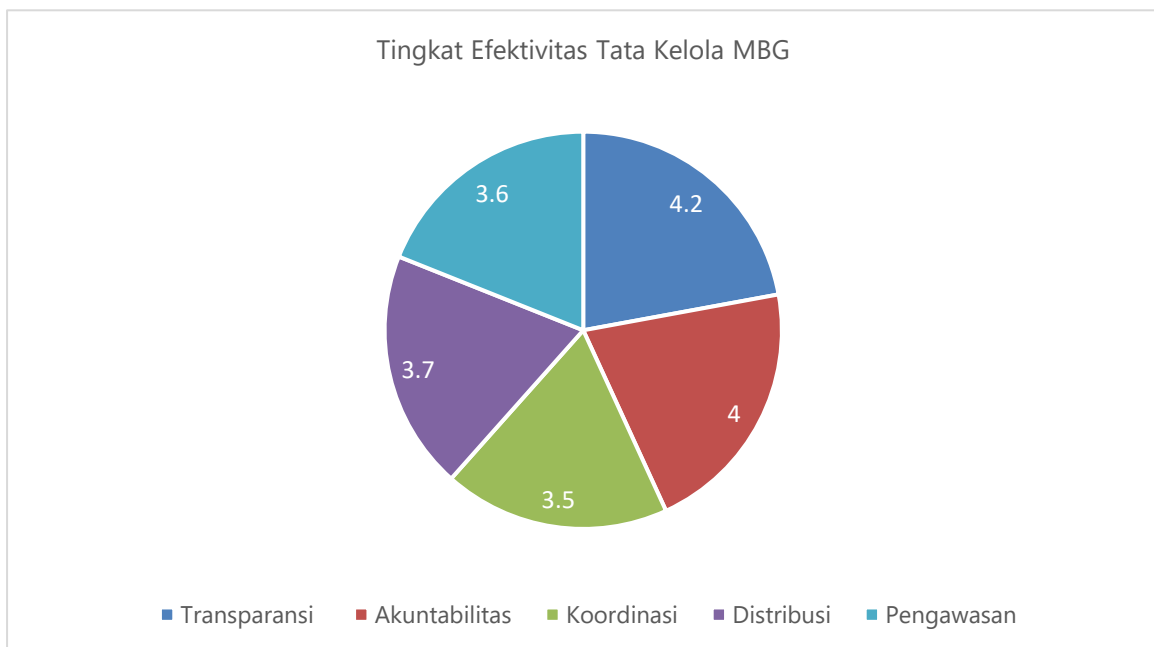
Karakteristik	Jumlah	Persentase
Laki-laki	34	56,7%
Perempuan	26	43,3%
Usia 20-30 tahun	18	30,0%
Usia 31-40 tahun	24	40,0%
Usia >40 tahun	18	30,0%
Pengelola Program	12	20,0%
Tenaga Pelaksana	20	33,3%
Pihak Sekolah	16	26,7%
Penyedia Pangan/UMKM	12	20,0%

Berdasarkan tabel tersebut, responden penelitian didominasi oleh pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG, seperti pengelola program, tenaga pelaksana, pihak sekolah, dan penyedia pangan lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki relevansi dengan fokus penelitian terkait tata kelola dan implementasi program.

**Hasil Analisis Tata Kelola Program MBG**

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola program MBG memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi program. Aspek tata kelola yang dianalisis meliputi transparansi, akuntabilitas, koordinasi antar lembaga, efektivitas distribusi pangan, serta sistem pengawasan program.

Gambar 1. Diagram Tingkat Efektivitas Tata Kelola MBG



Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai koordinasi antar pemangku kepentingan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek distribusi pangan, integrasi data penerima manfaat, dan pengawasan kualitas makanan. Selain itu, beberapa responden menyampaikan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kendala administratif dan teknis yang memengaruhi

efektivitas implementasi. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan utama dalam tata kelola program MBG meliputi keterbatasan koordinasi lintas sektor, belum optimalnya sistem monitoring, serta ketidaksiapan infrastruktur distribusi di beberapa wilayah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas *governance* dan kapasitas implementasi kebijakan.

### Hasil Analisis Keberlanjutan Implementasi Program

Keberlanjutan implementasi program MBG dianalisis berdasarkan aspek keberlanjutan anggaran, dukungan regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan sistem distribusi pangan.

Tabel 2. Hasil Analisis Keberlanjutan Implementasi Program MBG

Indikator	Nilai Rata-rata	Kategori
Dukungan Regulasi	4,12	Baik
Koordinasi Kelembagaan	3,45	Cukup
Keberlanjutan Anggaran	3,38	Cukup
Partisipasi Masyarakat	4,05	Baik
Sistem Distribusi	3,51	Cukup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi program MBG cukup dipengaruhi oleh stabilitas anggaran dan kesiapan kelembagaan. Meskipun dukungan regulasi terhadap pelaksanaan MBG dinilai cukup baik, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan dan konsistensi pelaksanaan program di tingkat daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dan keterlibatan UMKM lokal dinilai memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan program. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga membantu mendukung distribusi pangan dan penguatan ekonomi lokal.

### Hasil Analisis *Multiplier Effect* Program MBG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal, khususnya bagi UMKM pangan, petani lokal, dan penyedia jasa distribusi. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi lokal dan keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai distribusi program.

Gambar 2. Diagram *Multiplier Effect* Program MBG



Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program MBG memberikan peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal, terutama dalam penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, dan distribusi logistik. Namun demikian, beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa keberlanjutan dampak ekonomi masih bergantung pada konsistensi pelaksanaan program dan stabilitas dukungan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *multiplier effect* program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada penguatan jejaring sosial dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program.

### Hasil Analisis Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam implementasi program MBG dianalisis berdasarkan penggunaan sistem digital dalam pendataan penerima manfaat, monitoring distribusi pangan, pengawasan kualitas makanan, serta pengelolaan informasi program.

Tabel 3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dalam Program MBG

Aspek Pemanfaatan Teknologi	Persentase
Pendataan Digital	78%
Monitoring Distribusi	72%
Pengawasan Program	69%
Integrasi Data	61%
Pelaporan Digital	75%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam program MBG mulai berkembang, namun implementasinya masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya integrasi data antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem digital. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program, terutama dalam proses monitoring dan pelaporan kegiatan. Pemanfaatan teknologi juga membantu mempercepat proses koordinasi antar lembaga dan mendukung pengawasan distribusi pangan secara lebih sistematis.

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program MBG memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan secara berkelanjutan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas tata kelola dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan, sistem pengawasan, transparansi pelaksanaan program, serta kemampuan adaptasi kebijakan terhadap kondisi daerah. Dalam perspektif governance, keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kolaborasi antar aktor, efektivitas komunikasi kelembagaan, dan kapasitas implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustini et al. (2025) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi salah satu faktor utama ketidakefektifan program sosial pemerintah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi program MBG dipengaruhi oleh dukungan anggaran, kesiapan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal terbukti mampu memperkuat keberlanjutan program melalui dukungan distribusi pangan dan penguatan ekonomi lokal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa implementasi MBG tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan pangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang memiliki dampak *multiplier effect* terhadap masyarakat.

Dari aspek ekonomi, *multiplier effect* program MBG terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, koperasi, petani lokal, dan penyedia jasa distribusi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa program sosial pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Sementara itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki kontribusi penting terhadap efektivitas implementasi program MBG. Penggunaan sistem digital membantu meningkatkan transparansi, efektivitas monitoring, serta efisiensi pengelolaan data program. Temuan ini sejalan dengan konsep

*digital governance* yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. Namun demikian, implementasi teknologi dalam program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya integrasi data, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem digital yang lebih terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tata kelola program MBG memiliki hubungan yang erat dengan keberlanjutan implementasi program, *multiplier effect* ekonomi, dan efektivitas pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, penguatan tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program MBG secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki pengaruh penting terhadap keberlanjutan implementasi program, *multiplier effect* ekonomi, serta efektivitas pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran dan cakupan penerima manfaat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas *governance*, koordinasi antar pemangku kepentingan, sistem pengawasan, serta kesiapan kelembagaan dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi *multiplier effect* yang cukup besar terhadap penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani lokal, koperasi, dan penyedia jasa distribusi pangan. Selain berkontribusi terhadap pemenuhan gizi peserta didik, program ini juga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat pembangunan sosial-ekonomi daerah. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sistem monitoring, kesiapan infrastruktur distribusi, serta keberlanjutan dukungan anggaran dan regulasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki kontribusi penting dalam mendukung efektivitas implementasi program MBG. Penggunaan sistem digital dalam pendataan penerima manfaat, monitoring distribusi pangan, pengawasan kualitas makanan, dan pelaporan program mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, implementasi teknologi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan integrasi data, infrastruktur digital, dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program MBG secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sistem digital terintegrasi, serta pengawasan program yang lebih efektif agar pelaksanaan MBG dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *governance*, *sustainable policy implementation*, dan *digital governance* dalam program sosial pemerintah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola program MBG agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustini, I. T. W., Deliarnoor, N. A., & Kartini, D. S. (2025). Government Instruments and Challenges in the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Bandung City. *LOGOS: Journal of Local Government Issues*, 8(2), 320-337. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i2.41554>.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji, K. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1413-1423. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3208>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Ed. 6). SAGE Publications.
- Harjani, H. J. (2024). Pendidikan Gizi Seimbang Anak Usia Dini di Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Al-Fitrah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 7(1), 84-106. doi: <http://dx.doi.org/10.29300/ja.v7i2.4416>.
- Huda, A. A. S., Aghnia, Nurhuda, A., Ahmad, W. I., Hamdi, & Anugrah, D. S. (2026). Kajian Literatur Mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Pendidikan. *Journal of Golden Generation Education*, 2(2), 235-256. <https://doi.org/10.65244/jgge.v2i2.718>.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- Orbawati, E. B., Fadlurrahman, Mukti, A., & Nugraha J. T. (2025). Street-level Disrection and Adaptive Strategies in Indonesia's Free Nutritious Meal Program. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(4), 378-396. <https://doi.org/10.29210/1172300>.
- Pratama, R. A., & Setiawan, A. (2024). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian *Digital Governance*. *Jurnal Trias Politika*, 8(2), 306-328. <https://doi.org/10.33373>.
- Rahayu, L. F. (2025). Dinamika Dukungan Politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 815-831. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.381>.
- Sammeng, W., & Soumokil, O. (2023). Hubungan Sarapan Pagi dengan Status Gizi dan Prestasi Akademik Mahasiswa. *Jurnal Kesehatan Terpadu (Integrated Health Journal)*, 14(2), 100-109. <https://doi.org/10.32695/jkt.v14i2.460>.
- Santoso, A., Melianawati, B. D., & Ayuningtyas, E. A. (2025). Governance Analysis of the Implementation of the Free Nutrious Meal Program. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi*, 4(1), 240-270. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v4i1.423>.
- UNESCO. (2022). *UNESCO strategy on education for health and well-being*. Paris: UNESCO. <https://www.iicba.unesco.org/en/africa-education-knowledge-platform/unesco-strategy-education-health-and-well-being>.